



Pemerintah Kabupaten
Gresik

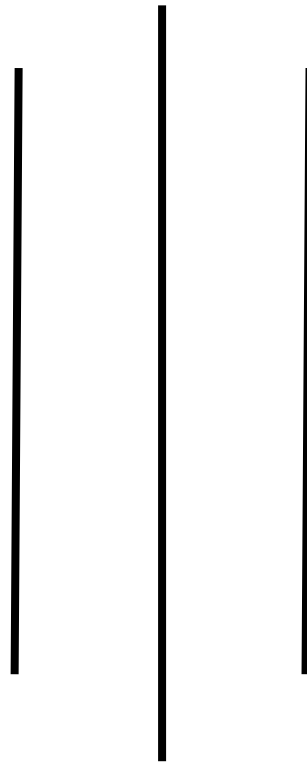


DOKUMEN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK

2025 - 2029



**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 - 2029**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik adalah dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi bahan materi penyusunan Rencan Kerja Tahunan (RKT).

RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran struktural dan fungsional yang akan diimplementasikan dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 2025 sampai dengan 2029 dalam rangka meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD sesuai dengan fungsinya.

Dengan disusunnya RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD didalam mencapai tujuan organisasi untuk Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang

bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya dokumen ini. Namun demikian masukan dan saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan dari semua pihak agar dikemudian hari RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik menjadi lebih sempurna.

Gresik, 19 September 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GRESIK



Ir. MOKH NAJIKH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
 BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	 11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ...	11
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	45
 BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 48
3.1 Tujuan dan Sasaran	48
3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	56
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	59
 BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 61
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	61
4.2. Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan	74
4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ...	87

4.4. Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	90
4.5. Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	92
4.6. Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	94
4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD	96
4.8. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD	97
BAB V : PENUTUP	103
5.1. Mekanisme Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi	103
5.2. Mekanisme Perubahan Renstra	104
5.3. Penutup	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra menjadi dokumen penting yang menjabarkan arah kebijakan pembangunan sekaligus sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, Sekretariat DPRD berkewajiban menyusun Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025–2029, sehingga terjamin keterpaduan, konsistensi, dan keberlanjutan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik berfungsi untuk mengarahkan dukungan kesekretariatan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Dengan adanya dokumen ini, seluruh program dan kegiatan Sekretariat DPRD dapat dijalankan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Selain itu, Renstra juga memperkuat upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) melalui perencanaan yang berbasis kinerja. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun, sehingga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD.

Capaian Renstra kemudian dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan demikian, Renstra tidak hanya

menjadi dokumen perencanaan jangka menengah, tetapi juga menjadi alat monitoring, evaluasi, dan pengendalian yang memastikan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik memberikan dukungan optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, antara lain meliputi :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotrapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 adalah Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor

- 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Seri D);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025- 2029;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029;
 39. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di Kabupaten Gresik;
 40. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 41. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 memiliki maksud sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Renstra ini menjadi arah dan navigasi bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan memiliki dasar perencanaan yang jelas, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

2. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah.

Dokumen Renstra ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Sekretariat DPRD, sehingga setiap tahun tersedia dokumen operasional yang lebih rinci mengenai program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai prioritas dan kebutuhan.

3. Sebagai acuan pengukuran kinerja perangkat daerah

Renstra ini memuat sasaran dan indikator kinerja yang menjadi standar dalam menilai keberhasilan Sekretariat DPRD. Dengan adanya acuan ini, kinerja dapat dievaluasi secara obyektif, transparan, dan berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 adalah:

1. Menjadi instrumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta indikator kinerja Sekretariat DPRD dalam periode lima tahun.
2. Mengoptimalkan dukungan Sekretariat DPRD kepada DPRD Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).
3. Menjamin konsistensi perencanaan pembangunan daerah, khususnya sinkronisasi antara RPJMD Kabupaten Gresik, Renstra

Sekretariat DPRD, hingga dokumen rencana kerja tahunan.

4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD, karena setiap program dan kegiatan memiliki indikator serta target capaian yang terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dan penulisan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

Memuat uraian kondisi umum, dasar penyusunan Renstra, pentingnya dokumen Renstra bagi Sekretariat DPRD, serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan;

Memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.

1.3. Maksud dan Tujuan;

Menjelaskan maksud penyusunan Renstra sebagai pedoman pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD serta tujuan strategis yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan susunan bab dan subbab dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

Subbab ini menguraikan tugas pokok, fungsi, dan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam memberikan dukungan administratif, keuangan, persidangan, serta fasilitasi hubungan antara DPRD dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Uraian ini juga menegaskan peran strategis Sekretariat DPRD sebagai unsur penunjang utama dalam mendukung pelaksanaan tiga fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

Subbab ini berisi identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, baik yang terkait dengan keterbatasan sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana, maupun efektivitas sistem kerja dan koordinasi dan menguraikan isu-isu penting yang bersifat strategis dan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Sekretariat DPRD di masa mendatang.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran;

Menjabarkan hasil akhir yang ingin dicapai dalam periode 2025–2029, dengan indikator kinerja utama (IKU) dan Menggambarkan hasil yang lebih spesifik, terukur, dan tahunan, sebagai dasar penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan, dilengkapi dengan indikator sasaran dan target.

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

Menjelaskan strategi utama yang ditempuh Sekretariat DPRD, termasuk penjabaran ke dalam kebijakan dan program berdasarkan analisis faktor internal/eksternal.

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

Menguraikan arah kebijakan yang menjadi pedoman program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta keterkaitannya dengan RPJMD, NSPK, dan kebutuhan spesifik Sekretariat DPRD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan;

4.3. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;

4.4. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029;

4.5. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;

4.6. Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis

Perangkat Daerah;

- 4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD;
- 4.8. Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD.

BAB V PENUTUP

- 5.1. Mekanisme Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Renstra; Dilaksanakan melalui Rencana kerja tahunan. Pengendalian dilakukan berjenjang melalui monitoring, rapat koordinasi, dan laporan berkala. Evaluasi dilaksanakan tiap akhir tahun melalui LKjIP dengan membandingkan target dan realisasi, serta dijadikan dasar perbaikan kinerja;
- 5.2. Mekanisme Perubahan Renstra; Perubahan Renstra dilakukan bila ada perubahan kebijakan, regulasi, kebutuhan pelayanan, atau ketidaksesuaian target dan capaian. Reviu dan penyesuaian dokumen dilakukan sesuai aturan, lalu ditetapkan kembali dengan Peraturan Kepala Daerah;
- 5.3. Penutup.

Renstra ini menjadi pedoman kerja Sekretariat DPRD 2025–2029. Dokumen bersifat dinamis dan keberhasilannya ditentukan oleh komitmen seluruh aparatur untuk mendukung visi dan misi pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok untuk memberikan dukungan administratif, keuangan, persidangan, serta fasilitasi hubungan antara DPRD dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Peran ini menempatkan Sekretariat DPRD sebagai unsur penunjang utama dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan perda, penganggaran, dan pengawasan.

Berdasarkan amanat pasal 215 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014, Sekretariat DPRD memiliki tugas antara lain :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan;
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
4. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sedangkan mengenai tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Sesuai dengan Peraturan tersebut Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Sekretariat DPRD merupakan unsur penunjang dalam pelayanan administrasi dan pemberian dukungan dalam bentuk fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan. Pelayanan ini mencakup administrasi umum, kepegawaian, keuangan, persidangan, perundang-undangan, serta penyediaan tenaga ahli dan koordinasi

informasi. Tujuannya adalah memastikan DPRD dapat berfungsi secara optimal untuk menyerap dan menyuarakan aspirasi masyarakat.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut ;

1. Sekretariat DPRD

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- d. Fasilitasi penganggaran, pengawasan, kerjasama dan aspirasi; dan
- e. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2. Bagian Umum

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian layanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kesekretariatan DPRD dan keanggotaan DPRD. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian penyusunan perencanaan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga sekretariat DPRD dan administrasi keanggotaan DPRD;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, sarana dan prasarana perlengkapan dan rumah tangga;

- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, pelayanan kesehatan dan pakaian dinas kesekretariatan dan anggota DPRD;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Umum terdiri dari :

- 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD;
 - b. Menyusun rancangan tata kelola administrasi umum, surat menyurat dan kepegawaian Sekretariat DPRD dan keanggotaan DPRD;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi tertib penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian Sekretariat DPRD dan keanggotaan DPRD;
 - d. Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah;
 - e. Melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya aparatur, akselerasi dan check up kesehatan pimpinan dan anggota DPRD;
 - f. Menyusun rancangan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan dukungan administrasi umum, surat menyurat dan kepegawaian;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat dan kepegawaian; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang mempunyai tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, sarana dan prasarana perlengkapan dan rumah tangga.
3. Bagian Program dan Keuangan
Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian dalam mendukung DPRD di bidang pengelolaan administrasi perencanaan program dan penatausahaan keuangan yang meliputi perencanaan program, anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan, serta laporan kinerja dan anggaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian penyusunan program, anggaran, perbendaharaan dan pelaporan keuangan;
 - b. Pelaksanaan pengoordinasian kebijakan dibidang program, Anggaran, Perbendaharaan dan pelaporan keuangan;
 - c. Pelaksanaan pengendalian penatausahaan keuangan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi evaluasi kinerja program, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan keuangan;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Program dan Keuangan terdiri dari :

1. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Sub koordinator yang mempunyai tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing masing pengelompokan uraian fungsi Bagian Program dan Keuangan.

4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian fasilitasi tugas DPRD dalam pelaksanaan persidangan dan pembentukan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian pelaksanaan persidangan, penyiapan draft Peraturan Daerah inisiatif, penyusunan risalah rapat dan mengkaji rumusan rapat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian pelaksanaan persidangan, penyiapan draft Peraturan Daerah inisiatif, penyusunan risalah rapat dan mengkaji rumusan rapat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan persidangan, penyiapan draft peraturan daerah inisiatif, penyusunan risalah rapat alat kelengkapan DPRD dan mengkaji rumusan rapat;
- d. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan persidangan, penyiapan draft peraturan daerah inisiatif, penyusunan risalah rapat dan mengkaji rumusan rapat;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan dukungan analisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- f. pelaksanaan pelayanan penyediaan bahan dan penyelenggaraan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdiri dari :

1. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Sub koordinator yang mempunyai tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing masing pengelompokan uraian fungsi Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.

5. Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS ;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. Pelaksanaan fasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan, kerjasama dan menampung aspirasi masyarakat;
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi terdiri dari :

1. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Sub koordinator yang mempunyai tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional / Tenaga Ahli

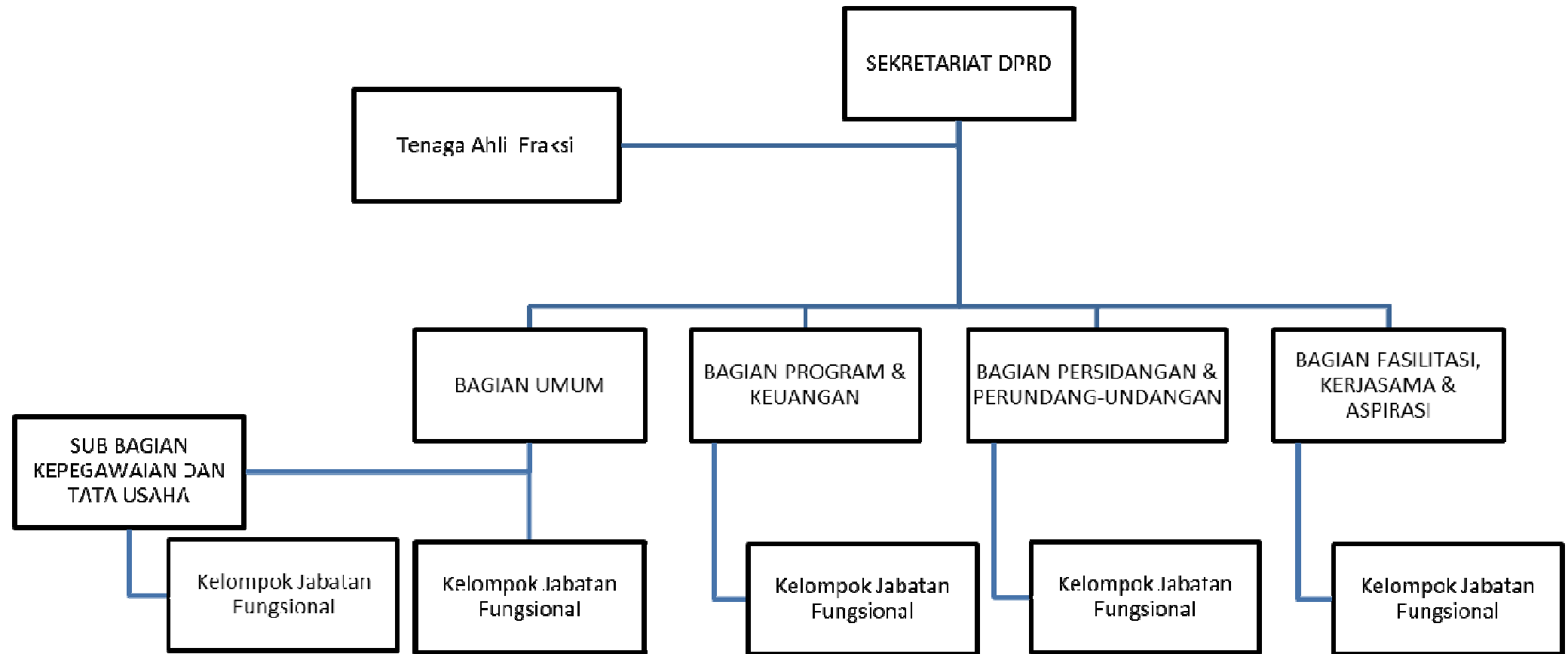
Yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok jabatan fungsional / tenaga ahli terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :

1. Sekretaris;
2. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri dari :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi, terdiri dari :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional (Tenaga Ahli).

Sebagaimana gambaran di atas, maka struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik sesuai lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dapat dilihat lebih lanjut pada diagram (*organization chart*) berikut ini :

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik adalah segala kekuatan dan kemampuan pendukung pelaksanaan program-program pemerintah daerah 5 tahun kedepan.

Secara operasional, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dengan kriteria yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara rinci data aparatur / pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan sebagai berikut :

**Tabel 2.1.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik
berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Mei 2025**

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur (II/c)	-	-	1	2	-	-	3
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	3	-	-	-	3
3.	Penata Muda (III/a)	-	-	2	-	7	-	9
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	-	-	9	-	9
	Penata (III/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	-	-	5	2	7
4.	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	2	1	3
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Madya	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
	(IV/d)							
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	6	2	23	5	36

Bila ditinjau dari jumlah pegawai yang ada memang kurang ideal tetapi dengan kemampuan yang ada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik senantiasa berupaya memaksimalkan peranan pegawai sesuai tugas dan fungsi yang ada. Hal ini dapat dilihat pada table peta jabatan berikut ini :

Selain pegawai PNS, ada pula pegawai non PNS yang membantu dalam pelaksanaan tugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) yang berjumlah 66 orang terdiri dari Tenaga Administrasi 38 orang, Sekretaris Pribadi Pimpinan 3 orang, Pengemudi untuk Pimpinan 3 orang, Pengamanan 12 Orang, Pramusaji 4 orang dan Tenaga Kebersihan 6 orang.

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.2 Jumlah Aset Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Gresik Per 31 Mei 2025**

No	Kode Bidang	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)	Kondisi
1	01	Tanah	1	2.362.500.000,00	Baik
2	01.01	Tanah	1	2.362.500.000,00	Baik
3	02	Peralatan dan Mesin	1.746	16.997.224.134,30	Baik
4	02.02	Alat – Alat Besar	5	526.570.000,00	Baik
5	02.03	Alat Angkutan	29	5.012.971.535,00	Baik
6	02.06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.391	11.073.431.624,45	Baik
7	02.07	Alat Studio dan Komunikasi	321	3.112.030.960,10	Baik
8	03	Gedung dan Bangunan	2	9.520.192.374,08	Baik
9	03.11	Bangunan	2	9.520.192.374,08	Baik

Terselenggaranya *good governance* dan *clean government* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Maka dari itu diperlukan pengembangan dan penerapan kinerja yang maksimal.

A. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD, terdiri dari :

a. Menyusun rencana kerja dan usulan kebutuhan anggaran keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;

- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kesekretariatan DPRD.
 - c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan dalam mendukung DPRD dibidang pengelolaan keuangan yang meliputi perbendaharaan, verifikasi dan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
 - d. Melaksanakan pelayanan fasilitasi DPRD dalam penyelenggaraan administrasi pelaksanaan persidangan, perundang-undangan dan alat kelengkapan DPRD;
 - e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kegiatan fasilitasi fungsi penganggaran dan pengawasan serta kerjasama dan aspirasi DPRD;
 - f. Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- B. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, terdiri dari :
- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran atas hak keuangan dan layanan kesejahteraan DPRD;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan administrasi keuangan dan rumah tangga DPRD;
 - c. Pelaksanaan kebijakan bidang ketatausahaan dan administrasi keanggotaan DPRD.
- C. Penyelenggaraan Rapat – Rapat DPRD
- a. Fasilitasi pelaksanaan rapat / sidang paripurna DPRD;
 - b. Fasilitasi dan pelaksanaan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan rapat pimpinan dan rapat alat kelengkapan DPRD;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan risalah hasil rapat dan persidangan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD;
 - d. Pelaksanaan pelayanan kelengkapan bahan rapat paripurna, rapat pimpinan dan rapat alat kelengkapan DPRD;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rancangan jadwal kegiatan DPRD.
- D. Penyediaan dan Pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD

- a. Melakukan analisis dan identifikasi permasalahan di dalam kegiatan pembahasan DPRD untuk menentukan spesifikasi kebutuhan Tenaga Ahli;
- b. Melakukan verifikasi administrasi Tenaga Ahli sesuai spesifikasi keahlian yang dibutuhkan DPRD;
- c. Mengangkat dan memberhentikan Tenaga Ahli sesuai peraturan yang berlaku;

Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kabupaten Gresik selama tahun anggaran 2021 – 2026 secara sederhana dapat disampaikan sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026**

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Indeks SPBE	√		√			2,55	3,01	3,19	3,65	3,86	2,55	3,01	3,19	3,65	3,86	100 %	100 %	100 %	100%	100%	
	Indeks Pelayanan Publik.	√		√																		
	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan		√	√			100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	
	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Fungsi DPRD		√	√			100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	
	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas DPRD		√	√			100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	
	Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		√	√			100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kesekretariatan			√			100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	Indikator Program
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			√			100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	Indikator Program

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			√			100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	Indikator Program
	Ketepatan Penetapan Ranperda Tahun N			√			100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	Indikator Program
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N			√			100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	Indikator Program
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			√			100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	Indikator Program
	Persentase Dukungan Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas DPRD			√			100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	Indikator Program
	Persentase Ketercapaian Sasaran Program Perangkat Daerah			√			100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	Indikator Program
	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah						12 dokumen	12 dokumen	11 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	11 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	11 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Indikator Kegiatan
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah						8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis			8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis			8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis			Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3 Laporan			8 Laporan	8 Laporan	3 Laporan			8 Laporan	8 Laporan	3 Laporan			8 Laporan	8 Laporan	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Renja OPD						4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis			4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis			4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4 Laporan			5 Laporan	5 Laporan	4 Laporan			5 Laporan	5 Laporan	4 Laporan			5 Laporan	5 Laporan	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah ASN Perangkat Daerah						34 Orang	36 Orang	36 Orang			34 Orang	36 Orang	36 Orang			34 Orang	36 Orang	36 Orang			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						36 Orang			34 Orang / Bulan	34 Orang / Bulan	36 Orang			34 Orang / Bulan	34 Orang / Bulan	36 Orang			34 Orang / Bulan	34 Orang / Bulan	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah rekening sub kegiatan Perangkat Daerah						68 Jenis	68 Jenis	68 Jenis			68 Jenis	68 Jenis	68 Jenis			68 Jenis	68 Jenis	68 Jenis			Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						N/A			1138 Dokumen	1138 Dokumen	N/A			1138 Dokumen	1138 Dokumen	N/A			1138 Dokumen	1138 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah akhir tahun						5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis			5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis			5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5 Laporan			5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan			5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan			5 Laporan	5 Laporan	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis			13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis			13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						9 Laporan			9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan			9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan			9 Laporan	9 Laporan	Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran						1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran			1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran			1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran			Indi kato r Sub Kegi atan
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1 Dok ume n			1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n			1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n			1 Dok ume n	1 Dok ume n	Indi kato r Sub Kegi atan
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						N/A				5 Paket	N/A				5 Paket	N/A				5 Paket	Indi kato r Sub Kegi atan
	Jumlah data administrasi kepegawaian						4 Data	4 Data	4 Data			4 Data	4 Data	4 Data			4 Data	4 Data	4 Data			Indi kato r Sub Kegi atan
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						N/A			17 Dok ume n	17 Dok ume n	N/A			17 Dok ume n	17 Dok ume n	N/A			17 Dok ume n	17 Dok ume n	Indi kato r Sub Kegi atan
	Jumlah kegiatan diklat pegawai berdasarkan tusi						10 Kegi atan	10 Kegi atan	10 Kegi atan			10 Kegi atan	10 Kegi atan	10 Kegi atan			10 Kegi atan	10 Kegi atan	10 Kegi atan			Indi kato r Sub Kegi atan
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						60 Oran g			60 Oran g	60 Oran g	60 Oran g			60 Oran g	60 Oran g	60 Oran g			60 Oran g	60 Oran g	Indi kato r Sub Kegi atan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah bimtek implementasi peraturan perundang-undangan						4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan			4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan			4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						40 Orang			40 Orang	40 Orang	40 Orang			40 Orang	40 Orang	40 Orang			40 Orang	40 Orang	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis			3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis			3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						N/A			1 Paket	1 Paket	N/A			1 Paket	1 Paket	N/A			1 Paket	1 Paket	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor						6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis			6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis			6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						N/A			7 Paket	7 Paket	N/A			7 Paket	7 Paket	N/A			7 Paket	7 Paket	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah peralatan dan Peralatan Rumah Tangga						N/A	6 Jenis	6 Jenis			N/A	6 Jenis	6 Jenis			N/A	6 Jenis	6 Jenis			Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
																						atan
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						N/A			2 Paket	2 Paket	N/A			2 Paket	2 Paket	N/A			2 Paket	2 Paket	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah peralatan dan Peralatan Rumah Tangga						N/A	168 Jenis	168 Jenis			N/A	168 Jenis	168 Jenis			N/A	168 Jenis	168 Jenis			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						N/A			74 Paket	74 Paket	N/A			74 Paket	74 Paket	N/A			74 Paket	74 Paket	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan						N/A	13 Jenis	13 Jenis			N/A	13 Jenis	13 Jenis			N/A	13 Jenis	13 Jenis			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						N/A			5 Paket	5 Paket	N/A			5 Paket	5 Paket	N/A			5 Paket	5 Paket	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu						N/A	132 Kali	132 Kali			N/A	132 Kali	132 Kali			N/A	132 Kali	132 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						N/A			132 Laporan	132 Laporan	N/A			132 Laporan	132 Laporan	N/A			132 Laporan	132 Laporan	Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
																						atan
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						N/A	20 Rapat	20 Rapat			N/A	20 Rapat	20 Rapat			N/A	20 Rapat	20 Rapat			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						N/A			20 Laporan	20 Laporan	N/A			20 Laporan	20 Laporan	N/A			20 Laporan	20 Laporan	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						N/A				1 Dokumen	N/A				1 Dokumen	N/A				1 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah pengadaan mebel						N/A	2 Jenis	2 Jenis			N/A	2 Jenis	2 Jenis			N/A	2 Jenis	2 Jenis			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						N/A			3 Unit	3 Unit	N/A			3 Unit	3 Unit	N/A			3 Unit	3 Unit	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya						N/A		5 Paket			N/A		5 Paket			N/A		5 Paket			Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						N/A			3 Unit	3 Unit	N/A			3 Unit	3 Unit	N/A			3 Unit	3 Unit	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah jasa surat menyurat						N/A	144 Kali	144 Kali			N/A	144 Kali	144 Kali			N/A	144 Kali	144 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						N/A			90 Laporan	90 Laporan	N/A			90 Laporan	90 Laporan	N/A			90 Laporan	90 Laporan	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						N/A	4 Jenis	4 Jenis			N/A	4 Jenis	4 Jenis			N/A	4 Jenis	4 Jenis			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						N/A			12 Laporan	12 Laporan	N/A			12 Laporan	12 Laporan	N/A			12 Laporan	12 Laporan	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah jasa pelayanan umum kantor						N/A	57 Orang	57 Orang			N/A	57 Orang	57 Orang			N/A	57 Orang	57 Orang			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						N/A			78 Laporan	78 Laporan	N/A			78 Laporan	78 Laporan	N/A			78 Laporan	78 Laporan	Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah pemeliharaan dan jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan						4 Unit, 32 kali	4 Unit, 32 kali	4 Unit, 32 kali			4 Unit, 32 kali	4 Unit, 32 kali	4 Unit, 32 kali			4 Unit, 32 kali	4 Unit, 32 kali	4 Unit, 32 kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						4 Unit, 32 kali			4 Unit	4 Unit	4 Unit, 32 kali			4 Unit	4 Unit	4 Unit, 32 kali			4 Unit	4 Unit	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah pemeliharaan dan jumlah kendaraan dinas operasional						4 Unit	26 Unit, 104 kali	26 Unit, 104 kali			4 Unit	26 Unit, 104 kali	26 Unit, 104 kali			4 Unit	26 Unit, 104 kali	26 Unit, 104 kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						26 Unit, 104 kali			26 Unit	26 Unit	26 Unit, 104 kali			26 Unit	26 Unit	26 Unit, 104 kali			26 Unit	26 Unit	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah mebel yang dipelihara						26 Unit	224 Jenis	224 Jenis			26 Unit	224 Jenis	224 Jenis			26 Unit	224 Jenis	224 Jenis			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah mebel yang dipelihara						N/A			156 Unit	156 Unit	N/A			156 Unit	156 Unit	N/A			156 Unit	156 Unit	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya						N/A	14 Jenis	14 Jenis			N/A	14 Jenis	14 Jenis			N/A	14 Jenis	14 Jenis			Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
																						atan
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						N/A			101 Unit	101 Unit	N/A			101 Unit	101 Unit	N/A			101 Unit	101 Unit	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya						N/A	5 Jenis, 2 Paket	5 Jenis, 2 Paket			N/A	5 Jenis, 2 Paket	5 Jenis, 2 Paket			N/A	5 Jenis, 2 Paket	5 Jenis, 2 Paket			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						N/A			2 Unit	2 Unit	N/A			2 Unit	2 Unit	N/A			2 Unit	2 Unit	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya						N/A	9 Jenis, 7 Orang, 2 Paket	9 Jenis, 7 Orang, 2 Paket			N/A	9 Jenis, 7 Orang, 2 Paket	9 Jenis, 7 Orang, 2 Paket			N/A	9 Jenis, 7 Orang, 2 Paket	9 Jenis, 7 Orang, 2 Paket			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						N/A			5 Unit	5 Unit	N/A			5 Unit	5 Unit	N/A			5 Unit	5 Unit	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD						N/A	50 Orang	50 Orang			N/A	50 Orang	50 Orang			N/A	50 Orang	50 Orang			Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD						50 Orang			50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	50 Orang			50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	50 Orang			50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD						50 Orang	6 Jenis	6 Jenis			50 Orang	6 Jenis	6 Jenis			50 Orang	6 Jenis	6 Jenis			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan						6 Jenis			5 Paket	5 Paket	6 Jenis			5 Paket	5 Paket	6 Jenis			5 Paket	5 Paket	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah layanan medical check up DPRD						6 Jenis	50 Orang	50 Orang			6 Jenis	50 Orang	50 Orang			6 Jenis	50 Orang	50 Orang			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD						50 Orang			50 Orang	50 Orang	50 Orang			50 Orang	50 Orang	50 Orang			50 Orang	50 Orang	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah layanan administrasi keanggotaan DPRD						50 Orang	5 Jenis	5 Jenis			50 Orang	5 Jenis	5 Jenis			50 Orang	5 Jenis	5 Jenis			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD						N/A			10 Dokumen	10 Dokumen	N/A			10 Dokumen	10 Dokumen	N/A			10 Dokumen	10 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah kebutuhan administrasi Fraksi DPRD						N/A	7 Fraksi	7 Fraksi			N/A	7 Fraksi	7 Fraksi			N/A	7 Fraksi	7 Fraksi			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD						N/A			10 Laporan	10 Laporan	N/A			10 Laporan	10 Laporan	N/A			10 Laporan	10 Laporan	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD						N/A	10 Jenis	10 Jenis			N/A	10 Jenis	10 Jenis			N/A	10 Jenis	10 Jenis			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						N/A			10 Laporan	10 Laporan	N/A			10 Laporan	10 Laporan	N/A			10 Laporan	10 Laporan	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah kegiatan pembahasan program pembentukan Perda						N/A	8 Kali	8 Kali			N/A	8 Kali	8 Kali			N/A	8 Kali	8 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah						N/A			8 Dokumen	8 Dokumen	N/A			8 Dokumen	8 Dokumen	N/A			8 Dokumen	8 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah kegiatan pembahasan rancangan Perda						N/A	8 Kali	8 Kali			N/A	8 Kali	8 Kali			N/A	8 Kali	8 Kali			Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						N/A			2 Dokumen	2 Dokumen	N/A			2 Dokumen	2 Dokumen	N/A			2 Dokumen	2 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kajian perundang-undangan						N/A	4 Kali	4 Kali			N/A	4 Kali	4 Kali			N/A	4 Kali	4 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan						N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan proses penyusunan naskah akademik dan Ranperda inisiatif DPRD						N/A	4 Kali	4 Kali			N/A	4 Kali	4 Kali			N/A	4 Kali	4 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi						N/A			8 Dokumen	8 Dokumen	N/A			8 Dokumen	8 Dokumen	N/A			8 Dokumen	8 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun						N/A			1 Dokumen	1 Dokumen	N/A			1 Dokumen	1 Dokumen	N/A			1 Dokumen	1 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah										120000 Orang					120000 Orang					120000 Orang	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah kegiatan penyusunan KUA dan PPAS						N/A	4 Kali	4 Kali			N/A	4 Kali	4 Kali			N/A	4 Kali	4 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS						N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah kegiatan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan						N/A	4 Kali	4 Kali			N/A	4 Kali	4 Kali			N/A	4 Kali	4 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah kegiatan pembahasan APBD						N/A	10 Kali	10 Kali			N/A	10 Kali	10 Kali			N/A	10 Kali	10 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD						N/A			6 Dokumen	6 Dokumen	N/A			6 Dokumen	6 Dokumen	N/A			6 Dokumen	6 Dokumen	Indikator Sub

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
																						Kegiatan
	Jumlah kegiatan pembahasan APBD Perubahan						N/A	10 Kali	10 Kali			N/A	10 Kali	10 Kali			N/A	10 Kali	10 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan						N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah kegiatan pembahasan laporan semester						N/A		4 Kali			N/A		4 Kali			N/A		4 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester						N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah kegiatan pembahasan pertanggungjawaban APBD						N/A	10 Kali	10 Kali			N/A	10 Kali	10 Kali			N/A	10 Kali	10 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum						N/A	54 Kali	54 Kali			N/A	54 Kali	54 Kali			N/A	54 Kali	54 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						N/A			12 Laporan	12 Laporan	N/A			12 Laporan	12 Laporan	N/A			12 Laporan	12 Laporan	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur						N/A	54 Kali	54 Kali			N/A	54 Kali	54 Kali			N/A	54 Kali	54 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						N/A			12 Laporan	12 Laporan	N/A			12 Laporan	12 Laporan	N/A			12 Laporan	12 Laporan	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat						N/A	54 Kali	54 Kali			N/A	54 Kali	54 Kali			N/A	54 Kali	54 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						N/A			12 Laporan	12 Laporan	N/A			12 Laporan	12 Laporan	N/A			12 Laporan	12 Laporan	Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian						N/A	54 Kali	54 Kali			N/A	54 Kali	54 Kali			N/A	54 Kali	54 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						N/A			12 Laporan	12 Laporan	N/A			12 Laporan	12 Laporan	N/A			12 Laporan	12 Laporan	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam						N/A	54 Kali	54 Kali			N/A	54 Kali	54 Kali			N/A	54 Kali	54 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						N/A			12 Laporan	12 Laporan	N/A			12 Laporan	12 Laporan	N/A			12 Laporan	12 Laporan	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						N/A			1 Dokumen	1 Dokumen	N/A			1 Dokumen	1 Dokumen	N/A			1 Dokumen	1 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran						N/A	8 Kali	8 Kali			N/A	8 Kali	8 Kali			N/A	8 Kali	8 Kali			Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran						N/A			6 Dokumen	6 Dokumen	N/A			6 Dokumen	6 Dokumen	N/A			6 Dokumen	6 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah						N/A	2 Kali	2 Kali			N/A	2 Kali	2 Kali			N/A	2 Kali	2 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah						N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						N/A	3 Kali	3 Kali			N/A	3 Kali	3 Kali			N/A	3 Kali	3 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun						N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	N/A			4 Dokumen	4 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah pelaksanaan kegiatan Reses DPRD						N/A	3 Kali	3 Kali			N/A	3 Kali	3 Kali			N/A	3 Kali	3 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses						N/A			3 Dokumen	3 Dokumen	N/A			3 Dokumen	3 Dokumen	N/A			3 Dokumen	3 Dokumen	Indikator Sub

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
																						Kegiatan
	Jumlah rapat kerja Badan kehormatan DPRD dan kegiatan pengawasan kode etik DPRD						N/A	16 Kali	16 Kali			N/A	16 Kali	16 Kali			N/A	16 Kali	16 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD						N/A			2 Laporan	2 Laporan	N/A			2 Laporan	2 Laporan	N/A			2 Laporan	2 Laporan	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah						N/A			2 Dokumen	2 Dokumen	N/A			2 Dokumen	2 Dokumen	N/A			2 Dokumen	2 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD						N/A				50 dokumen	N/A				50 dokumen	N/A				50 dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah kegiatan bimtek DPRD						N/A	6 Kali	6 Kali			N/A	6 Kali	6 Kali			N/A	6 Kali	6 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD						N/A			6 Dokumen	6 Dokumen	N/A			6 Dokumen	6 Dokumen	N/A			6 Dokumen	6 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Jumlah publikasi advetorial/iklan DPRD di media massa, Jumlah produk legeslasi DPRD yang dipublikasikan, Jumlah publikasi kegiatan DPRD, Jumlah media cetak untuk mempublikasikan kegiatan DPRD, Jumlah sistem teknologi informasi di Sekretariat DPRD yang dikembangkan.						N/A	444 Jenis	444 Jenis			N/A	444 Jenis	444 Jenis			N/A	444 Jenis	444 Jenis			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan						N/A			269 Dokumen	269 Dokumen	N/A			269 Dokumen	269 Dokumen	N/A			269 Dokumen	269 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi						N/A	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	N/A	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	N/A	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah kegiatan kemitraan antara DPRD, Sekretariat DPRD dan Wartawan, serta fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat (demo)						N/A	25 Kali	25 Kali			N/A	25 Kali	25 Kali			N/A	25 Kali	25 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						N/A			24 Dokumen	24 Dokumen	N/A			24 Dokumen	24 Dokumen	N/A			24 Dokumen	24 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah kegiatan penyusunan program kerja DPRD						N/A	37 Kali	37 Kali			N/A	37 Kali	37 Kali			N/A	37 Kali	37 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD						N/A			1 Dokumen	1 Dokumen	N/A			1 Dokumen	1 Dokumen	N/A			1 Dokumen	1 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi DPRD						N/A					N/A					N/A					Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD						N/A	134 Kali	134 Kali			N/A	134 Kali	134 Kali			N/A	134 Kali	134 Kali			Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						N/A			116 Dokumen	116 Dokumen	N/A			116 Dokumen	116 Dokumen	N/A			116 Dokumen	116 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah fasilitasi kegiatan penyusunan laporan kinerja DPRD						N/A	8 Kali	8 Kali			N/A	8 Kali	8 Kali			N/A	8 Kali	8 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun						N/A			6 Laporan	6 Laporan	N/A			6 Laporan	6 Laporan	N/A			6 Laporan	6 Laporan	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah DPRD						N/A	37 Kali	37 Kali			N/A	37 Kali	37 Kali			N/A	37 Kali	37 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						N/A			24 Dokumen	24 Dokumen	N/A			24 Dokumen	24 Dokumen	N/A			24 Dokumen	24 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah fasilitasi tugas Pimpinan DPRD						N/A	36 Kali	36 Kali			N/A	36 Kali	36 Kali			N/A	36 Kali	36 Kali			Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						N/A			36 dokumen	36 dokumen	N/A			36 dokumen	36 dokumen	N/A			36 dokumen	36 dokumen	Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus									2 dokumen	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	Indikator Sub Kegiatan

Gresik, 19 September 2025
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GRESIK



Ir. MOKH NAJIKH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh target sasaran Perangkat Daerah dapat dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan hasil yang memuaskan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik pada dasarnya tidak langsung ditujukan kepada masyarakat luas, melainkan difokuskan pada dukungan kelembagaan DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, kelompok sasaran utama dari layanan Sekretariat DPRD adalah:

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gresik
 - Membutuhkan dukungan kesekretariatan dalam bentuk administrasi, fasilitasi rapat, penyusunan naskah akademik, penyediaan data, serta layanan keuangan.
 - Dampak yang diharapkan: pelaksanaan fungsi DPRD berjalan efektif, tertib, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Alat Kelengkapan DPRD (Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, dll.)
 - Membutuhkan dukungan teknis dan administratif untuk pembahasan program, kegiatan pengawasan, penyusunan kebijakan, serta koordinasi dengan mitra kerja.
 - Dampak yang diharapkan: terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas serta meningkatnya efektivitas fungsi pengawasan.
3. Sekretariat DPRD sendiri (aparatur & tenaga pendukung)
 - Membutuhkan peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta dukungan sarana prasarana modern.
 - Dampak yang diharapkan: meningkatnya profesionalitas dan akuntabilitas kinerja aparatur.
4. Masyarakat Kabupaten Gresik (secara tidak langsung)
 - Membutuhkan fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD, baik melalui reses, kunjungan kerja, maupun penerimaan aduan/masukan.
 - Dampak yang diharapkan: meningkatnya partisipasi publik dalam proses pembangunan daerah serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis.

2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan, telaahan kelompok sasaran, serta memperhatikan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dan Laporan KLHS RPJMD 2025–2029, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik menghadapi sejumlah permasalahan pokok yang memerlukan perhatian khusus. Permasalahan ini muncul baik dari aspek internal organisasi maupun dari tuntutan eksternal lingkungan strategis.

Permasalahan yang diidentifikasi antara lain:

1. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) terbatas, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi, penyusunan naskah produk hukum, dan manajemen administrasi modern.
2. Pemanfaatan sistem informasi belum optimal, sehingga proses fasilitasi rapat, dokumentasi persidangan, dan layanan administrasi masih belum sepenuhnya efisien dan transparan.
3. Keterbatasan sarana prasarana penunjang seperti ruang rapat, perangkat teknologi, serta fasilitas dokumentasi yang berpengaruh terhadap kelancaran persidangan dan kegiatan DPRD.
4. Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan DPRD.
5. Mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat yang perlu ditingkatkan agar lebih responsif, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan sistem informasi daerah.

Selain itu, dukungan pelaksanaan fungsi DPRD juga masih memerlukan penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) agar tertib administrasi dan konsistensi pelayanan dapat terjaga.

Permasalahan-permasalahan tersebut jika tidak segera diatasi dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD. Namun di sisi lain, kondisi ini juga membuka peluang perbaikan, antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholder*).

2.2.2. Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pelayanan yang telah diidentifikasi, serta memperhatikan faktor lingkungan dinamis (global, nasional, regional) dan arah pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Gresik

Tahun 2025–2029, maka isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparaturnya Sekretariat DPRD, terutama dalam penguasaan teknologi informasi dan penyusunan produk hukum.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung fasilitasi persidangan, administrasi keuangan, dan dokumentasi kegiatan DPRD.
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran rapat, persidangan, serta hubungan DPRD dengan masyarakat.
4. Penguatan koordinasi dan sinergi antara DPRD dengan perangkat daerah, mitra kerja, serta pemangku kepentingan lainnya.
5. Peningkatan kualitas fasilitasi hubungan DPRD dengan masyarakat, agar mekanisme penyampaian aspirasi lebih transparan, responsif, dan terintegrasi.

Tabel 2.2.2
Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Potensi sumber daya manusia	Kapasitas SDM terbatas	Peningkatan kualitas aparatur dan tata kelola kelembagaan	Tuntutan transparansi	Reformasi birokrasi	Penguatan aparatur daerah	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur
	Pemanfaatan sistem informasi belum optimal	Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan (<i>paperless office</i>)	Digitalisasi birokrasi		Implementasi e-government	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
	Mekanisme aspirasi belum responsif	Peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan	Demokratisasi	Keterbukaan informasi publik	Integrasi sistem aspirasi	Peningkatan kualitas fasilitasi hubungan DPRD dengan masyarakat
	Sarana prasarana penunjang terbatas	Efisiensi dan akuntabilitas tata kelola	Efisiensi sumber daya	<i>Good governance</i>	Peningkatan pelayanan publik	Penyediaan sarana prasarana modern & akuntabel

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu dan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik merupakan hasil akhir yang harus dicapai yang merupakan penjabaran secara spesifik dan terukur guna mewujudkan visi dan misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi DPRD yang merupakan mitra kerja dari Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi Kepala Daerah.

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 berkaitan dengan tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah disusun dengan :

- a. Kalimat kondisi;
- b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan
- d. Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.

Dengan berlandaskan visi Kepala Daerah yang telah ditetapkan didalam RPJMD yaitu :

**“Pembangunan Gresik Maju Yang Berkelanjutan Sebagai
Pusat Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat”**

dengan misi ke (4) yaitu :

**“Meningkatkan Sistem Pemerintahan Yang Transparan,
Akuntabel, dan Berorientasi Pada Pelayanan Yang Terbaik Bagi
Masyarakat”**

maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah :

**“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Cerdas, Inovatif,
Akuntabel, dan Melayani (*Smart Governance*)”**

dengan sasaran :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif dan Transparan Melalui Transformasi Digital, Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor, serta Pengelolaan SDM Aparatur Berbasis Sistem Merit”

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik untuk periode 2025–2029 menetapkan tujuan perangkat daerah, yaitu :

“Terwujudnya Sinergitas Antara Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

Dengan indikator **“Indeks Pelayanan Publik”**.

3.1.2. Sasaran

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran juga merupakan kinerja utama yang harus dicapai dari suatu organisasi perangkat daerah sebagai alasan mendasar atas eksistensi organisasi tersebut.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD juga menetapkan sasaran yang merupakan refleksi dari tanggung jawab Sekretaris DPRD yaitu :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Dukungan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”

Dengan indikator :

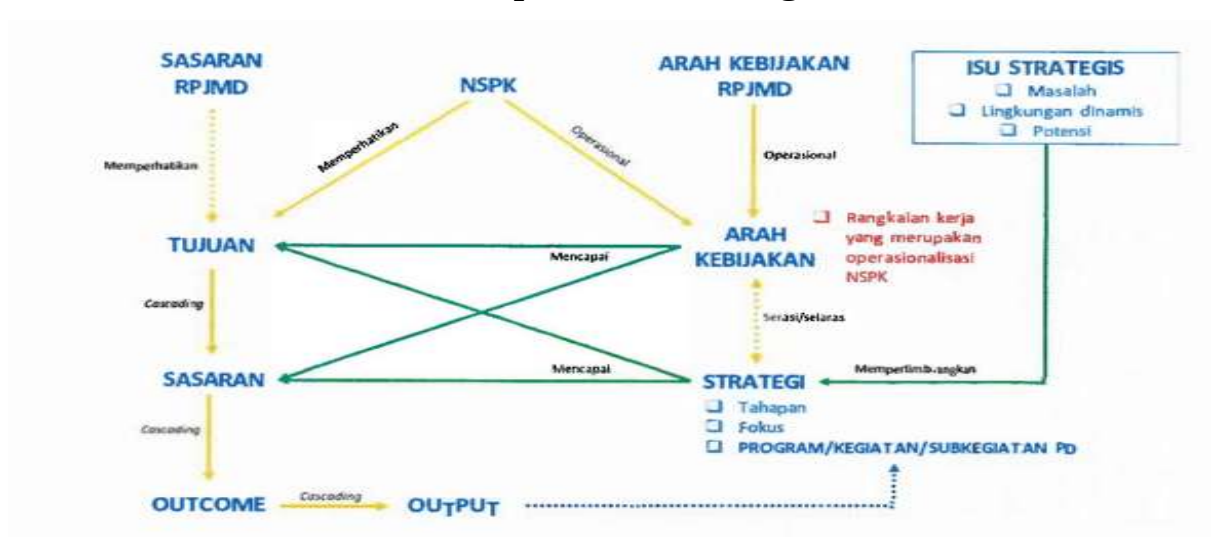
1. Persentase penyelenggaraan layanan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
2. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD;
3. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD; dan

4. Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

sebagai bentuk tanggungjawab secara teknis operasional kepada Pimpinan DPRD.

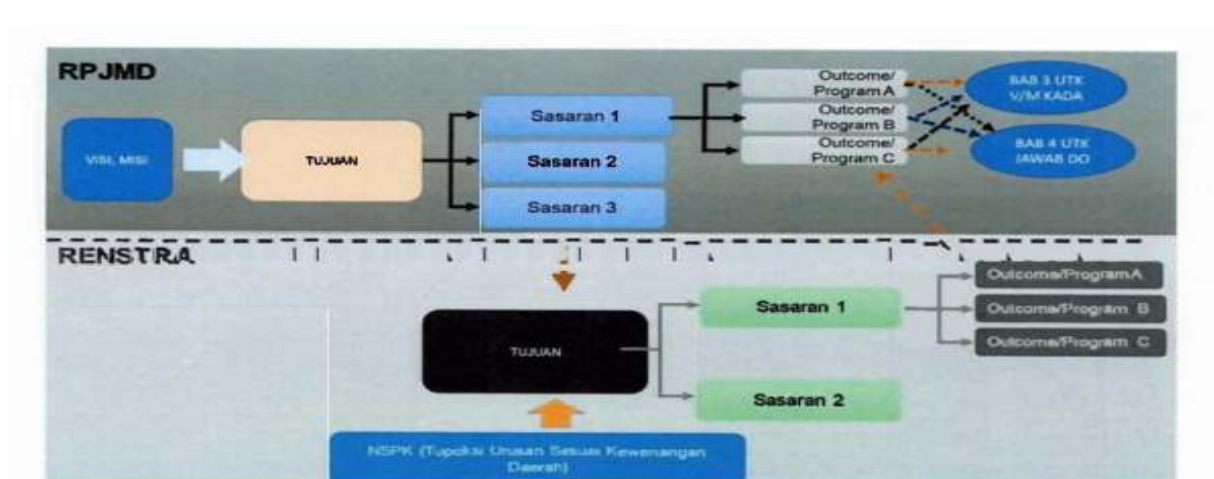
Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Hubungan keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD



Dalam penentuan Tujuan dan Sasaran beserta target Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline* sebagaimana table berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya; 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Terwujudnya Sinergitas Antara Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Pelayanan Publik	√	√	√	2,25	2,51	2,75	3,01	3,51	4,10	Untuk mengukur kualitas pelayanan kepada anggota DPRD
			Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan		√	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Untuk mengukur kinerja pelayanan administratif Sekretariat DPRD
			Persentase Dukungan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD		√	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Untuk mengukur fasilitasi kegiatan berdasarkan tri fungsi DPRD
			Persentase Dukungan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas DPRD		√	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Untuk mengukur fasilitasi kegiatan berdasarkan tugas non fungsi DPRD

			Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	√	√	√	96,25	96,50	96,75	96.90	97	97.25	Untuk mengukur tingkat kepuasan atas pelayanan operasional Sekretariat DPRD
--	--	--	---	---	---	---	-------	-------	-------	-------	----	-------	---

Tabel 3.1.1 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
• Penyusunan regulasi internal dan SOP layanan dukungan DPRD. • Pemetaan kebutuhan SDM dan analisis gap kompetensi. • Penguatan sistem administrasi berbasis digital (e-office, arsip elektronik). • Peningkatan kualitas layanan rapat, persidangan, dan penyusunan produk hukum..	• Pelatihan teknis dan manajerial SDM Setwan (analisis kebijakan, komunikasi publik, IT). • Pengembangan database informasi potensi daerah untuk mendukung fungsi legislasi. • Optimalisasi layanan kehumasan DPRD agar lebih transparan dan partisipatif. • Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) yang lebih terukur.	• Implementasi sistem informasi terpadu untuk mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. • Peningkatan kualitas kajian dan naskah akademik yang dihasilkan bersama DPRD. • Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi (misalnya aplikasi aspirasi masyarakat). • Penguatan peran Setwan dalam memfasilitasi komunikasi DPRD dengan <i>stakeholder</i>.	• Penetapan Kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat basis data dan kajian. • Studi banding dan benchmarking ke daerah lain untuk adopsi praktik terbaik. • Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap kinerja DPRD. • Peningkatan kualitas publikasi dan transparansi kinerja DPRD.	• Evaluasi menyeluruh atas capaian Renstra Setwan periode berjalan. • Konsolidasi hasil dan penyusunan rekomendasi strategis untuk Renstra berikutnya. • Pencapaian target akhir: SDM yang profesional, sistem layanan digital terintegrasi, dan dukungan optimal bagi DPRD Gresik dalam pengambilan keputusan berbasis data. • Branding Setwan Gresik sebagai sekretariat legislatif yang inovatif, responsif, dan akuntabel.

Capaian Target Kinerja seringkali diasosiasikan dengan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi. Setiap organisasi tentunya berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya untuk dapat mencapai target yang optimal. Dalam manajemen kinerja, terdapat empat siklus yang dapat dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya adalah Monitoring dan Evaluasi. Umumnya, Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dalam sebuah rapat rutin yang diadakan secara periodik.

Untuk mencapai target yang telah ditentukan maka diperlukan suatu formulasi perhitungan yang tepat agar tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat DPRD benar-benar akuntabel dan dapat dicapai secara optimal. Untuk mencapai tujuan organisasi yaitu “Terwujudnya Sinergitas Antara Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik” maka formulasi perhitungannya berdasarkan capaian nilai indeks pelayanan publik yang tertuang dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik:

Sedangkan untuk mencapai sasaran organisasi yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Dukungan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” dengan indikator kesatu yaitu “Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan” maka formulasi perhitungan adalah sebagai berikut :

Jumlah pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan yang diselenggarakan	X
Jumlah pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan	100%

Sedangkan untuk indikator kedua yaitu “Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD” maka formulasi perhitungan adalah sebagai berikut :

Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan DPRD sesuai fungsinya	X
Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD sesuai fungsinya berdasarkan Renja DPRD	100%

Sedangkan untuk indikator ketiga yaitu “Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD” maka formulasi perhitungan adalah sebagai berikut :

Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan DPRD sesuai tugas non fungsinya	X
Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD sesuai tugas non fungsinya berdasarkan Renja DPRD	100%

Sedangkan untuk indikator ketiga yaitu “Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD” maka formulasi perhitungannya berdasarkan nilai hasil survey indeks kepuasan masyarakat (Anggota DPRD) yang dituangkan dalam dokumen Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kebijakan dan program. Strategi menjadi faktor penting dalam perencanaan strategis karena berfungsi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya organisasi dan dinamika lingkungan strategis.

Penjabaran pertama dari strategi adalah kebijakan, yaitu ketentuan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan agar tercapai keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Selanjutnya, kebijakan dituangkan dalam bentuk program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Berdasarkan isu-isu strategis, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan, maka strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, melalui penyempurnaan mekanisme kerja, dukungan tenaga ahli, serta koordinasi lintas perangkat daerah.

2. Optimalisasi fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi, penguatan dokumentasi, dan pelaporan hasil kegiatan DPRD untuk mendorong peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Penguatan kapasitas aparatur dalam bidang perencanaan, pelaporan, dan pelayanan administrasi melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan tugas.
4. Peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD agar mampu mengimplementasikan kebijakan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
5. Pengembangan sistem informasi dan sarana prasarana penunjang kinerja DPRD yang moderen, adaptif, dan terintegrasi guna mendukung pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

3.2.1. Analisis SWOT dan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF)

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal melalui metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*).

A. Faktor Internal

1. Kekuatan (*Strength*) :

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai;
- b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- c. Hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD;
- d. Kedudukan Sekretariat DPRD yang lebih fungsional diperkuat melalui Peraturan Bupati Gresik No 81 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

2. Kelemahan (*Weakness*) :

- a. Kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal;
- b. Sarana pendukung kegiatan DPRD yang masih terbatas;
- c. Pemanfaatan sarana teknologi informasi belum maksimal;

- d. Belum selarasnya tugas dan fungsi aparatur dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yg ada sehingga tidak mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang (*Opportunity*) :

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
- d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong digitalisasi layanan;
- e. Adanya peluang pemanfaatan tenaga ahli untuk mendukung kinerja DPRD..

2. Ancaman/Tantangan (*Threath*) :

- a. Seringnya perubahan regulasi terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintah daerah;
- b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD;
- c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior;
- d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

C. Faktor- faktor Kunci keberhasilan

1. Peningkatan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD agar mampu mengikuti perkembangan teknologi, mengelola tim kerja, dan memberikan layanan berkualitas.
2. Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Penyelarasan tugas dan fungsi aparatur dengan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai peraturan, sehingga tercapai efektivitas dan akuntabilitas organisasi.

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik perlu dijabarkan ke dalam arah kebijakan. Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan agar konsisten dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 serta selaras dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Arah kebijakan ini juga merupakan bentuk operasionalisasi NSPK yang relevan dengan kewenangan Sekretariat DPRD. Dengan demikian, arah kebijakan tidak hanya mencerminkan prioritas pembangunan daerah, tetapi juga memperhatikan dinamika lingkungan strategis serta kebutuhan pelayanan terhadap DPRD dan masyarakat.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD	Transformasi digital tata kelola pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan optimalisasi sistem informasi sekretariat	Fokus pada efisiensi & akuntabilitas layanan
2	Pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD	Reformasi birokrasi berbasis kinerja & peningkatan akuntabilitas	Peningkatan kualitas fasilitasi penyusunan Perda, pembahasan APBD, dan pengawasan DPRD	Mendukung tercapainya fungsi utama DPRD
3	Fasilitasi hubungan DPRD dengan masyarakat	Penguatan layanan publik yang transparan, responsif, dan inklusif	Optimalisasi mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat berbasis TI	Mendorong peningkatan kepuasan masyarakat
4	Pengelolaan SDM, tata kelola, dan sarana prasarana Sekretariat DPRD	Pengembangan kapasitas aparatur berbasis sistem merit	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur serta penyediaan sarana prasarana penunjang	Untuk mendukung kepuasan anggota DPRD

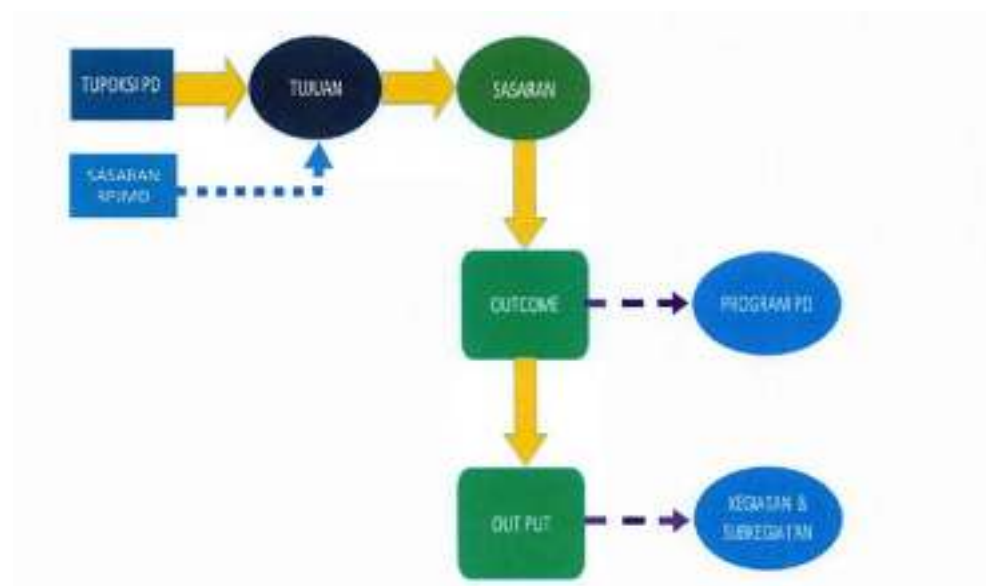
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Kerangka perumusan program,/kegiatan/sub kegiatan Sekretariat DPRD dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Sekretariat DPRD**



Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam kurun waktu tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Program Utama :

- I. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD,** ditujukan dalam rangka melaksanakan 3 (tiga) fungsi DPRD dan peningkatan SDM DPRD; peningkatan komunikasi (serap aspirasi dan publikasi) antara DPRD dengan masyarakat; dan publikasi kegiatan dan kinerja DPRD kepada masyarakat/konstituen dengan kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan sub

kegiatan :

- 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - 2) Pembahasan Rancangan Perda;
 - 3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
 - 4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik;
 - 5) Penyusunan Tata Tertib DPRD;
 - 6) Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, dengan sub kegiatan ;
- 1) Pembahasan KUA dan PPAS;
 - 2) Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan;
 - 3) Pembahasan APBD;
 - 4) Pembahasan APBD Perubahan;
 - 5) Pembahasan Laporan Semester;
 - 6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan sub kegiatan ;
- 1) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - 2) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur
 - 3) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 4) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian;
 - 5) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam;
 - 6) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 7) Pengawasan Penggunaan Anggaran;
 - 8) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan sub kegiatan :
- 1) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 - 2) Pelaksanaan Reses;
 - 3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah.

5. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Kode Etik DPRD;
 - 2) Pengawasan Kode Etik DPRD.
6. Pembahasan Kerja Sama Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah.
7. Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan sub kegiatan :
 - 1) Orientasi DPRD;
 - 2) Pendalaman Tugas DPRD;
 - 3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim ahli;
 - 4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
 - 5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
 - 6) Penyusunan Program Kerja DPRD;
 - 7) Publikasi dan Dokumentasi DPRD.
8. Fasilitasi Tugas DPRD, dengan sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
 - 2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
 - 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
 - 4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD;
 - 5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus.

Program Pendukung :

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ditujukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar operasional DPRD dan Sekretariat DPRD dengan kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

- Keuangan SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - 5) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Mebel;
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pemeliharaan Mebel;
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan sub kegiatan :
- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
 - 3) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD.
9. Layanan Administrasi DPRD, dengan sub kegiatan :
- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD;
 - 2) Fasilitas Fraksi DPRD;
 - 3) Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, diperlukan perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan ini juga diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 serta diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.



Tabel 4.1. Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN							
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Terwujudnya Sinergitas Antara Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan (%)		
					Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD (%)		
					Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD (%)		
					Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Nilai)		
		Terselenggaranya layanan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD			Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kesekretariatan (Angka)	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Angka)	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terpenuhinya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dan layak digunakan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Orang/Bulan)	Keuangan DPRD	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
				Terpenuhinya layanan administrasi DPRD	Jumlah dokumen layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	4.02.01.2.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	4.02.01.2.16.0002 - Fasilitasi Fraksi DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Terfasilitasinya kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
					Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)	4.02.02.2.01.0006 - Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan		Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
					Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Terfasilitasinya kegiatan pembahasan kebijakan anggaran	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	4.02.02.2.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
				Terfasilitasinya kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran	
					Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
				Terfasilitasinya kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
					Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	
				Terfasilitasinya kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pembahasan kerjasama daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembahasan kerjasama daerah yang difasilitasi	4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.07.0001 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	
			Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dprd		Presentase Dukungan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengawasan DPRD (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terfasilitasinya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD	
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD	
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
				Terfasilitasinya tugas DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi tugas DPRD	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
					Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	4.02.02.2.08.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	

4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra serta memastikan konsistensi dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik. Perencanaan ini merupakan instrumen penting untuk menjamin bahwa setiap kegiatan Sekretariat DPRD memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta penguatan peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah.

Rencana pendanaan yang ditetapkan bersifat indikatif, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, potensi sumber pendanaan yang tersedia, serta skala prioritas pembangunan tahunan yang dituangkan dalam RKPD. Dengan demikian, besaran pendanaan yang dialokasikan untuk program dan kegiatan Sekretariat DPRD akan selalu disesuaikan dengan dinamika fiskal daerah dan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut, penyusunan rencana program, kegiatan, dan pendanaan ini diarahkan untuk mendukung optimalisasi fasilitasi tugas DPRD dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan; meningkatkan efisiensi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan; memperkuat mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat; serta mendorong peningkatan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 selengkapnya disajikan dalam Tabel 4.2 berikut.



Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				107.120.713.000		110.297.662.000		114.347.946.000		120.076.444.000		123.742.229.000		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				47.640.808.000		49.102.726.000		50.882.622.000		53.577.390.000		54.991.496.000		
Terselenggaranya layanan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Angka)	100	100	47.640.808.000	100	49.102.726.000	100	50.882.622.000	100	53.577.390.000	100	54.991.496.000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	86,52	86,6		86,65		86,7		86,75		86,8			
	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kesekretariatan (Angka)	100	100		100		100		100		100			
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				613.657.000		631.882.000		650.648.000	30	669.973.000	29	689.870.000		
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	10	29	613.657.000	-	631.882.000	-	650.648.000	-	669.973.000	-	689.870.000		
4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				299.692.000,00		308.594.000		317.758.000		327.196.000		336.913.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	8	299.692.000	8	308.594.000	8	317.758.000	9	327.196.000	8	336.913.000		
4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				200.945.000		206.913.000		213.058.000		219.386.000		225.902.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	17	200.945.000	17	206.913.000	17	213.058.000	17	219.386.000	17	225.902.000		
4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				113.020.000		116.375.000		119.832.000		123.391.000		127.055.000		



Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	4	113.020.000	4	116.375.000	4	119.832.000	4	123.391.000	4	127.055.000		
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.280.398.000		6.466.659.000		6.704.127.000		7.039.981.000		7.254.904.000		
Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	46	60	6.256.336.000	60	6.441.883.000	60	6.678.441.000	60	7.013.008.000	60	7.227.107.000		
4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.005.993.000		6.184.116.000		6.411.206.000		6.732.388.000		6.937.920.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	50	6.005.993.000	50	6.184.116.000	50	6.411.206.000	50	6.732.388.000	50	6.937.920.000		
4.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				232.393.000		239.285.000		248.075.000		260.500.000		268.452.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	5	232.393.000	5	239.285.000	5	248.075.000	5	260.500.000	5	268.452.000		
4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				17.950.000		18.482.000		19.160.000		20.120.000		20.735.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	17.950.000	5	18.482.000	5	19.160.000	5	20.120.000	5	20.735.000		
4.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				15.770.000		16.238.000		16.834.000		17.678.000		18.217.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	9	9	15.770.000	9	16.238.000	9	16.834.000	9	17.678.000	9	18.217.000		
4.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				8.292.000		8.538.000		8.852.000		9.295.000		9.580.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	94	1	8.292.000	1	8.538.000	1	8.852.000	1	9.295.000	1	9.580.000		
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				193.628.000		200.387.000		208.318.000		218.500.000		225.913.000		



Terpenuhinya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	47	45	193.628.000	48	200.387.000	48	208.318.000	48	218.500.000	48	225.913.000		
4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000		52.500.000		55.000.000		57.500.000		60.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.000.000	1	57.500.000	1	60.000.000		
4.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.117.000		5.268.000		5.462.000		5.735.000		5.910.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	17	17	5.117.000	17	5.268.000	17	5.462.000	17	5.735.000	17	5.910.000		
4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				117.962.000		121.461.000		125.921.000		132.230.000		136.266.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	22	22	117.962.000	22	121.461.000	22	125.921.000	22	132.230.000	22	136.266.000		
4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.549.000		21.158.000		21.935.000		23.035.000		23.737.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8	5	20.549.000	8	21.158.000	8	21.935.000	8	23.035.000	8	23.737.000		
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.230.198.000		1.266.587.000		1.308.529.000		1.360.670.000		1.401.519.000		
Terpenuhinya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	572	459	1.230.198.000	459	1.266.587.000	459	1.308.529.000	459	1.360.670.000	459	1.401.519.000		
4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				93.125.000		95.887.000		99.408.000		104.388.000		107.575.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	93.125.000	1	95.887.000	1	99.408.000	1	104.388.000	1	107.575.000		
4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				181.300.000		186.677.000		193.532.000		203.227.000		209.431.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	3	181.300.000	3	186.677.000	3	193.532.000	3	203.227.000	3	209.431.000		
4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah				75.014.000		77.239.000		80.075.000		84.087.000		86.654.000		



Tangga													
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	75.014.000	2	77.239.000	2	80.075.000	2	84.087.000	2	86.654.000	
4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				82.676.000		85.128.000		88.254.000		92.675.000		95.504.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	74	60	82.676.000	60	85.128.000	60	88.254.000	60	92.675.000	60	95.504.000	
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				183.660.000		189.107.000		196.051.000		205.873.000		212.158.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	7	183.660.000	7	189.107.000	7	196.051.000	7	205.873.000	7	212.158.000	
4.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				136.031.000		140.044.000		144.175.000		148.428.000		152.807.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	461	360	136.031.000	360	140.044.000	360	144.175.000	360	148.428.000	360	152.807.000	
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				204.215.000		210.240.000		216.442.000		222.827.000		229.400.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20	204.215.000	20	210.240.000	20	216.442.000	20	222.827.000	20	229.400.000	
4.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				274.177.000		282.265.000		290.592.000		299.165.000		307.990.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	6	274.177.000	6	282.265.000	6	290.592.000	6	299.165.000	6	307.990.000	
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				174.809.000		179.228.000		183.778.000		188.462.000		193.285.000	
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	10	287	174.809.000	287	179.228.000	287	183.778.000	287	188.462.000	287	193.285.000	
4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	186	25.000.000	186	25.000.000	186	25.000.000	186	25.000.000	186	25.000.000	
4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				149.809.000		154.228.000		158.778.000		163.462.000		168.285.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	101	149.809.000	101	154.228.000	101	158.778.000	101	163.462.000	101	168.285.000	



4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.691.745.000		2.769.754.000		2.867.000.000		3.000.898.000		3.090.556.000		
Tersusunnya laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	242	167	2.691.745.000	167	2.769.754.000	167	2.867.000.000	167	3.000.898.000	167	3.090.556.000		
4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				27.858.000		28.684.000		29.737.000		31.227.000		32.181.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	90	90	27.858.000	90	28.684.000	90	29.737.000	90	31.227.000	90	32.181.000		
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				400.000.000		411.800.000		423.948.000		436.454.000		449.330.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	12	400.000.000	12	411.800.000	12	423.948.000	12	436.454.000	12	449.330.000		
4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.263.887.000		2.329.270.000		2.413.315.000		2.533.217.000		2.609.045.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	149	65	2.263.887.000	65	2.329.270.000	65	2.413.315.000	65	2.533.217.000	65	2.609.045.000		
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.281.762.000		1.319.619.000		1.360.625.000		1.406.912.000		1.448.739.000		
Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dan layak digunakan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	294	257	1.281.762.000	257	1.319.619.000	257	1.360.625.000	257	1.406.912.000	257	1.448.739.000		
4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				222.219.000		228.775.000		235.523.000		242.471.000		249.625.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	222.219.000	4	228.775.000	4	235.523.000	4	242.471.000	4	249.625.000		
4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				317.000.000		326.352.000		335.979.000		345.890.000		356.094.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	19	317.000.000	19	326.352.000	19	335.979.000	19	345.890.000	19	356.094.000		



4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				33.500.000		34.488.000		35.506.000		36.553.000		37.631.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	156	120	33.500.000	120	34.488.000	120	35.506.000	120	36.553.000	120	37.631.000		
4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				138.932.000		143.031.000		147.250.000		151.595.000		156.066.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	101	101	138.932.000	101	143.031.000	101	147.250.000	101	151.595.000	101	156.066.000		
4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				290.508.000		299.078.000		307.900.000		316.983.000		326.335.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	290.508.000	2	299.078.000	2	307.900.000	2	316.983.000	2	326.335.000		
4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				279.603.000		287.895.000		298.467.000		313.420.000		322.988.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	11	279.603.000	11	287.895.000	11	298.467.000	11	313.420.000	11	322.988.000		
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				34.998.666.00 0		36.088.129.00 0		37.413.334.00 0		39.287.633.00 0		40.487.036.00 0		
Terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	67	67	34.998.666.00 0	67	36.088.129.00 0	67	37.413.334.00 0	67	39.287.633.00 0	67	40.487.036.00 0		
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				34.344.330.00 0		35.414.386.00 0		36.714.851.00 0		38.554.158.00 0		39.731.169.00 0		
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	50	50	34.344.330.00 0	50	35.414.386.00 0	50	36.714.851.00 0	50	38.554.158.00 0	50	39.731.169.00 0		
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				578.952.000		596.123.000		618.013.000		648.973.000		668.786.000		
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	5	5	578.952.000	5	596.123.000	5	618.013.000	5	648.973.000	5	668.786.000		
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				75.384.000		77.620.000		80.470.000		84.502.000		87.081.000		
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	50	50	75.384.000	50	77.620.000	50	80.470.000	50	84.502.000	50	87.081.000		
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				175.945.000		180.481.000		186.263.000		404.361.000		199.674.000		
Terpenuhinya layanan administrasi DPRD	Jumlah dokumen layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	30	32	175.945.000	32	180.481.000	32	186.263.000	32	404.361.000	32	199.674.000		



4.02.01.2.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				50.256.000		51.747.000		53.647.000		56.335.000		58.055.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	10	10	50.256.000	10	51.747.000	10	53.647.000	10	56.335.000	10	58.055.000		
4.02.01.2.16.0002 - Fasilitas Fraksi DPRD				23.026.000		23.026.000		23.026.000		23.026.000		23.026.000		
Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD (Laporan)	10	12	23.026.000	12	23.026.000	12	23.026.000	12	23.026.000	12	23.026.000		
4.02.01.2.16.0003 - Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				102.663.000		105.708.000		109.590.000		325.000.000		118.593.000		
Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	10	10	102.663.000	10	105.708.000	10	109.590.000	10	325.000.000	10	118.593.000		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				59.479.905.000		61.194.936.000		63.465.324.000		66.499.054.000		68.750.733.000		
Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dprd	Presentase Dukungan Fasilitas Pelaksanaan Tugas DPRD (%)	100	100	18.735.889.000	100	19.278.899.000	100	19.966.263.000	100	21.408.461.000	100	21.555.799.000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN	
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				9.303.394.000		9.567.452.000		9.902.797.000		10.852.963.000		10.679.350.000		
Terfasilitasinya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	467	478	9.303.394.000	478	9.567.452.000	478	9.902.797.000	478	10.852.963.000	526	10.679.350.000		
4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD				99.000.000		99.000.000		99.000.000		576.968.000		99.000.000		
Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	0	2	99.000.000	2	99.000.000	2	99.000.000	2	576.968.000	50	99.000.000		
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD				3.993.830.000		4.112.277.000		4.263.290.000		4.476.865.000		4.613.540.000		
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	6	6	3.993.830.000	6	4.112.277.000	6	4.263.290.000	6	4.476.865.000	6	4.613.540.000		
4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	0	9	300.000.000	9	300.000.000	9	300.000.000	9	300.000.000	9	300.000.000		
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				253.825.000		261.355.000		270.950.000		284.525.000		293.210.000		
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	6	6	253.825.000	6	261.355.000	6	270.950.000	6	284.525.000	6	293.210.000		
4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				179.365.000		184.655.000		190.100.000		195.710.000		201.485.000		



Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	24	24	179.365.000	24	184.655.000	24	190.100.000	24	195.710.000	24	201.485.000		
4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD				385.000.000		396.425.000		410.980.000		431.570.000		444.745.000		
Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	1	385.000.000	1	396.425.000	1	410.980.000	1	431.570.000	1	444.745.000		
4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD				4.092.374.000		4.213.740.000		4.368.477.000		4.587.325.000		4.727.370.000		
Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	430	430	4.092.374.000	430	4.213.740.000	430	4.368.477.000	430	4.587.325.000	430	4.727.370.000		
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				9.432.495.000		9.711.447.000		10.063.466.000		10.555.498.000		10.876.449.000		
Terfasilitasinya tugas DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi tugas DPRD	244	243	9.432.495.000	243	9.711.447.000	243	10.063.466.000	243	10.555.498.000	243	10.876.449.000		
4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				3.361.680.000		3.461.382.000		3.588.488.000		3.768.260.000		3.883.300.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	116	116	3.361.680.000	116	3.461.382.000	116	3.588.488.000	116	3.768.260.000	116	3.883.300.000		
4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				388.385.000		399.900.000		414.586.000		435.355.000		448.645.000		
Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	6	5	388.385.000	5	399.900.000	5	414.586.000	5	435.355.000	5	448.645.000		
4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	12	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000		
4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				5.158.430.000		5.311.415.000		5.506.457.000		5.782.315.000		5.958.840.000		
Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	108	108	5.158.430.000	108	5.311.415.000	108	5.506.457.000	108	5.782.315.000	108	5.958.840.000		
4.02.02.2.08.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				500.000.000		514.750.000		529.935.000		545.568.000		561.664.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	2	2	500.000.000	2	514.750.000	2	529.935.000	2	545.568.000	2	561.664.000		
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	17.867.233.000	100	18.396.820.000	100	19.057.630.000	100	19.969.060.000	100	20.576.464.000		
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100		100		100		100		100			



4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				1.797.531.000		1.850.842.000		1.918.807.000		2.014.930.000		2.076.448.000		
Terfasilitasinya kegiatan pembahasan kebijakan anggaran	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	22	22	1.797.531.000	22	1.850.842.000	22	1.918.807.000	22	2.014.930.000	22	2.076.448.000		
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS				357.092.000		367.683.000		381.185.000		400.280.000		412.501.000		
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	4	4	357.092.000	4	367.683.000	4	381.185.000	4	400.280.000	4	412.501.000		
4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				352.802.000		363.265.000		376.604.000		395.470.000		407.545.000		
Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	4	4	352.802.000	4	363.265.000	4	376.604.000	4	395.470.000	4	407.545.000		
4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD				348.053.000		358.376.000		371.536.000		390.148.000		402.060.000		
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	4	4	348.053.000	4	358.376.000	4	371.536.000	4	390.148.000	4	402.060.000		
4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan				357.928.000		368.543.000		382.076.000		401.217.000		413.466.000		
Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	4	4	357.928.000	4	368.543.000	4	382.076.000	4	401.217.000	4	413.466.000		
4.02.02.2.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester				46.994.000		48.388.000		50.165.000		52.678.000		54.286.000		
Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	2	2	46.994.000	2	48.388.000	2	50.165.000	2	52.678.000	2	54.286.000		
4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				334.662.000		344.587.000		357.241.000		375.137.000		386.590.000		
Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	4	4	334.662.000	4	344.587.000	4	357.241.000	4	375.137.000	4	386.590.000		
4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				13.267.597.000		13.061.083.000		13.562.736.000		14.272.250.000		14.726.279.000		
Terfasilitasinya kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	204	204	13.267.597.000	204	13.061.083.000	204	13.562.736.000	204	14.272.250.000	204	14.726.279.000		
4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				3.016.527.000		2.955.990.000		3.070.046.000		3.231.361.000		3.334.590.000		



Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	48	48	3.016.527.000	48	2.955.990.000	48	3.070.046.000	48	3.231.361.000	48	3.334.590.000		
4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				3.195.862.000		3.140.644.000		3.261.481.000		3.432.386.000		3.541.752.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	48	48	3.195.862.000	48	3.140.644.000	48	3.261.481.000	48	3.432.386.000	48	3.541.752.000		
4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3.086.742.000		3.028.288.000		3.145.000.000		3.310.070.000		3.415.700.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	48	48	3.086.742.000	48	3.028.288.000	48	3.145.000.000	48	3.310.070.000	48	3.415.700.000		
4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				3.222.396.000		3.167.965.000		3.289.805.000		3.462.130.000		3.572.403.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	48	48	3.222.396.000	48	3.167.965.000	48	3.289.805.000	48	3.462.130.000	48	3.572.403.000		
4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				345.641.000		355.892.000		368.960.000		387.444.000		399.272.000		
Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	2	2	345.641.000	2	355.892.000	2	368.960.000	2	387.444.000	2	399.272.000		
4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran				29.367.000		30.238.000		31.348.000		32.919.000		33.924.000		
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	6	6	29.367.000	6	30.238.000	6	31.348.000	6	32.919.000	6	33.924.000		
4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				371.062.000		382.066.000		396.096.000		415.940.000		428.638.000		
Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	4	4	371.062.000	4	382.066.000	4	396.096.000	4	415.940.000	4	428.638.000		
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				2.412.025.000		3.083.300.000		3.162.301.000		3.254.870.000		3.334.079.000		



Terfasilitasinya kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	5	5	2.412.025.000	55	3.083.300.000	55	3.162.301.000	55	3.254.870.000	55	3.334.079.000		
4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				772.330.000		795.235.000		824.438.000		865.740.000		892.170.000		
Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	2	2	772.330.000	2	795.235.000	2	824.438.000	2	865.740.000	2	892.170.000		
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				1.639.695.000		1.688.065.000		1.737.863.000		1.789.130.000		1.841.909.000		
Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3	3	1.639.695.000	3	1.688.065.000	3	1.737.863.000	3	1.789.130.000	3	1.841.909.000		
4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				0		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	0	0	0	5000	600.000.000	5000	600.000.000	5000	600.000.000	5000	600.000.000		
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				246.195.000		253.465.000		261.286.000		270.010.000		278.028.000		
Terfasilitasinya kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	6	6	246.195.000	6	253.465.000	6	261.286.000	6	270.010.000	6	278.028.000		
4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD				200.000.000		205.900.000		211.974.000		218.227.000		224.665.000		
Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	2	2	200.000.000	2	205.900.000	2	211.974.000	2	218.227.000	2	224.665.000		
4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD				46.195.000		47.565.000		49.312.000		51.783.000		53.363.000		
Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	4	4	46.195.000	4	47.565.000	4	49.312.000	4	51.783.000	4	53.363.000		
4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah				143.885.000		148.130.000		152.500.000		157.000.000		161.630.000		
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pembahasan kerjasama daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)			143.885.000	2	148.130.000	2	152.500.000	2	157.000.000	2	161.630.000		
4.02.02.2.07.0001 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				143.885.000		148.130.000		152.500.000		157.000.000		161.630.000		
Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)			143.885.000	2	148.130.000	2	152.500.000	2	157.000.000	2	161.630.000		
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	22.876.783.000	100	23.519.217.000	100	24.441.431.000	100	25.121.533.000	100	26.618.470.000		



4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				22.876.783.00 0		23.519.217.00 0		24.441.431.00 0		25.121.533.00 0		26.618.470.00 0		
Terfasilitasinya kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	16	566	22.876.783.00 0	566	23.519.217.00 0	566	24.441.431.00 0	566	25.121.533.00 0	566	26.618.470.00 0		
4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				389.145.000		400.686.000		415.400.000		436.210.000		449.527.000		
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	2	2	389.145.000	2	400.686.000	2	415.400.000	2	436.210.000	2	449.527.000		
4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2.823.429.000		2.907.165.000		3.013.920.000		3.164.910.000		3.261.530.000		
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	8	8	2.823.429.000	8	2.907.165.000	8	3.013.920.000	8	3.164.910.000	8	3.261.530.000		
4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				794.049.000		817.600.000		847.621.000		890.085.000		917.260.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	1	1	794.049.000	1	817.600.000	1	847.621.000	1	890.085.000	1	917.260.000		
4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				2.513.644.000		2.588.192.000		2.683.235.000		2.817.655.000		2.903.675.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4	4	2.513.644.000	4	2.588.192.000	4	2.683.235.000	4	2.817.655.000	4	2.903.675.000		
4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD				354.684.000		365.147.000		375.920.000		387.010.000		398.425.000		
Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	1	354.684.000	1	365.147.000	1	375.920.000	1	387.010.000	1	398.425.000		
4.02.02.2.01.0006 - Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				16.001.832.00 0		16.440.427.00 0		17.105.335.00 0		17.425.663.00 0		18.688.053.00 0		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)	0	64.800	16.001.832.00 0	64.800	16.440.427.00 0	64.800	17.105.335.00 0	64.800	17.425.663.00 0	64.800	18.688.053.00 0		

4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik menetapkan beberapa sub kegiatan yang bersifat prioritas. Sub kegiatan ini dipilih karena memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kelembagaan DPRD sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah.

Penetapan sub kegiatan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara isu strategis yang dihadapi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra, serta arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dengan demikian, sub kegiatan prioritas yang ditetapkan tidak hanya berfungsi sebagai dukungan administratif, tetapi juga sebagai pengungkit untuk memperkuat peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan.

Lebih lanjut, sub kegiatan prioritas ini diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, serta memastikan ketersediaan layanan sekretariat yang profesional dan responsif. Seluruh sub kegiatan prioritas tersebut dirancang agar selaras dengan prinsip good governance, mendukung pencapaian indikator kinerja daerah, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Gresik.

Daftar lengkap sub kegiatan prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah ditampilkan pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

N o	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0
1	Gresik Tuntas Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan , Akuntable, dan Sustainabl e	Gresik <i>Integrate d Smart System</i>	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju. Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (One Data, One Portal, And Open Access)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	8	8	8	9	8

		Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju.	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6	6	6	6	6	6
--	--	--------------------	---	---	--	------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---

4.4. Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD yang berkaitan dengan program prioritas nasional bisa diarahkan pada aspek sosial, budaya, dan keamanan melalui peran fasilitatif dan administrasi diantaranya:

1. Dukungan kajian dan naskah akademik terkait regulasi kesejahteraan masyarakat, bansos, dan ketenagakerjaan.
2. Fasilitasi reses DPRD yang fokus pada aspirasi masyarakat di bidang seni, budaya dan pariwisata serta isu sosial dan keamanan.
3. Publikasi kegiatan DPRD dalam mendukung kebudayaan lokal dan nasional.

Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik tidak secara langsung menjalankan program sosial, budaya, atau keamanan, tetapi memberikan **dukungan teknis, administratif, dan fasilitatif** agar DPRD dapat melaksanakan fungsi politiknya sesuai dengan prioritas nasional.

Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangk at Daerah
	Target	Anggaran	Targ et	Anggaran	Targ et	Anggaran	Targ et	Anggaran	Targ et	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 7											
Kegiatan Prioritas Utama: Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat											
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keter angan dan/atau Naskah Akademik	4	22,176,783 ,000	4	22,769,217 ,000	4	23,641,431 ,000	4	24,271,533 ,000	4	25,718,470 ,000	Sekre tariat DPRD
Pelaksanaan Reses	3	1,639,695, 000	3	1,688,065, 000	3	1,737,863, 000	3	1,789,130, 000	3	1,841,909, 000	Sekre tariat DPRD
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	430	4,092,374, 000	430	4,213,740, 000	430	4,368,477, 000	430	4,587,325, 000	430	4,727,370, 000	Sekre tariat DPRD

4.5. Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD yang berkaitan dengan program prioritas nasional bisa diarahkan pada aspek sosial, budaya, dan keamanan melalui peran fasilitatif dan administrasi diantaranya:

1. Penyusunan bahan rapat anggaran DPRD untuk memastikan alokasi APBD mendukung proyek prioritas nasional (stunting, pendidikan, energi bersih).
2. Dukungan penggunaan teknologi digital untuk komunikasi DPRD dengan masyarakat terkait program prioritas.



Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional (PPN) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Targe t	Anggaran	Targe t	Anggaran	Targe t	Anggaran	Targe t	Anggaran	Targe t	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 7											
Kegiatan Prioritas Nasional : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat											
Pembahasan APBD	4	348,053,000.00	4	358,376,000.00	4	371,536,000.00	4	390,148,000.00	4	402,060,000.00	Sekretariat DPRD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6	274,177,000.00	6	282,265,000.00	6	290,592,000.00	6	299,165,000.00	6	307,990,000.00	Sekretariat DPRD

4.6. Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Secara langsung kontribusi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik pada Asta Cita memang tidak ada. Namun secara tidak langsung Sekretariat DPRD dapat berkontribusi dengan cara menyediakan layanan administrasi, fasilitasi kebijakan, dan dukungan kelembagaan DPRD agar DPRD bisa menyelaraskan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan agenda pembangunan tersebut.



Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 7											
Kegiatan Asta Cita : -											
						Nihil					

4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 disusun sebagai bentuk komitmen kinerja dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Target ini menjadi tolok ukur utama untuk menilai sejauh mana peran Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan fasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Penetapan target dilakukan dengan mengacu pada beberapa prinsip, yaitu:

1. Keterukuran (*measurable*) → indikator yang digunakan memiliki satuan dan nilai capaian yang jelas.
2. Relevansi (*relevant*) → indikator disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Konsistensi (*consistent*) → target tahunan bersifat berkesinambungan dan linier dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029.
4. Akuntabilitas (*accountable*) → capaian indikator dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif.

Indikator yang digunakan dalam Renstra ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dengan pelayanan kesekretariatan, keuangan, serta dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dengan penetapan target ini diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik mampu menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan anggota DPRD, serta memperkuat sinergitas antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berikut target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029:

Tabel 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030

No	IKU	Satuan	Base line	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase	Persen	100	100	100	100	100	100%	100	100%

No	IKU	Satuan	Base line	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Penyelenggaraa n Pelayanan Administrasi Kesekretariata n dan Keuangan		%	%	%	%	%		%	
2	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%
3	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%
4	Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai		96,25	96,50	96,75	96.90	97	97.25	97.25

Dengan demikian, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 menjadi dasar acuan dalam pengukuran kinerja perangkat daerah. Target ini diharapkan tidak hanya menggambarkan capaian angka secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas layanan kesekretariatan, penguatan dukungan terhadap fungsi DPRD, serta terwujudnya sinergitas antara DPRD dan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

4.8. Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator turunan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur kinerja Sekretariat DPRD secara lebih rinci dan operasional. IKK berfungsi sebagai instrumen manajemen internal untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat tercapai melalui kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan.

Penetapan IKK dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dilakukan dengan memperhatikan keselarasan dengan RPJMD Kabupaten Gresik, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Selain itu, IKK juga dirancang

agar dapat menjadi indikator yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART) sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja tahunan maupun jangka menengah.

Target IKK diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD, penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD. Dengan demikian, pencapaian IKK secara konsisten akan berkontribusi langsung terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD.

Berikut adalah target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029:

Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030

No	IKK	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kesekretariatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	86.52	86,55	86,60	86,65	86,70	86,75	86,55	86.80
4	Ketepatan Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penetapan Perda APBD Tahun N	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pengawasan Penyeleng	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

	garaan Pemerinta han									
7	Indeks Kepuasan Masyaraka t	Nilai	96.25	96,2 5	96,5 0	96,7 5	96,9 0	97,0 0	97,2 5	97,25

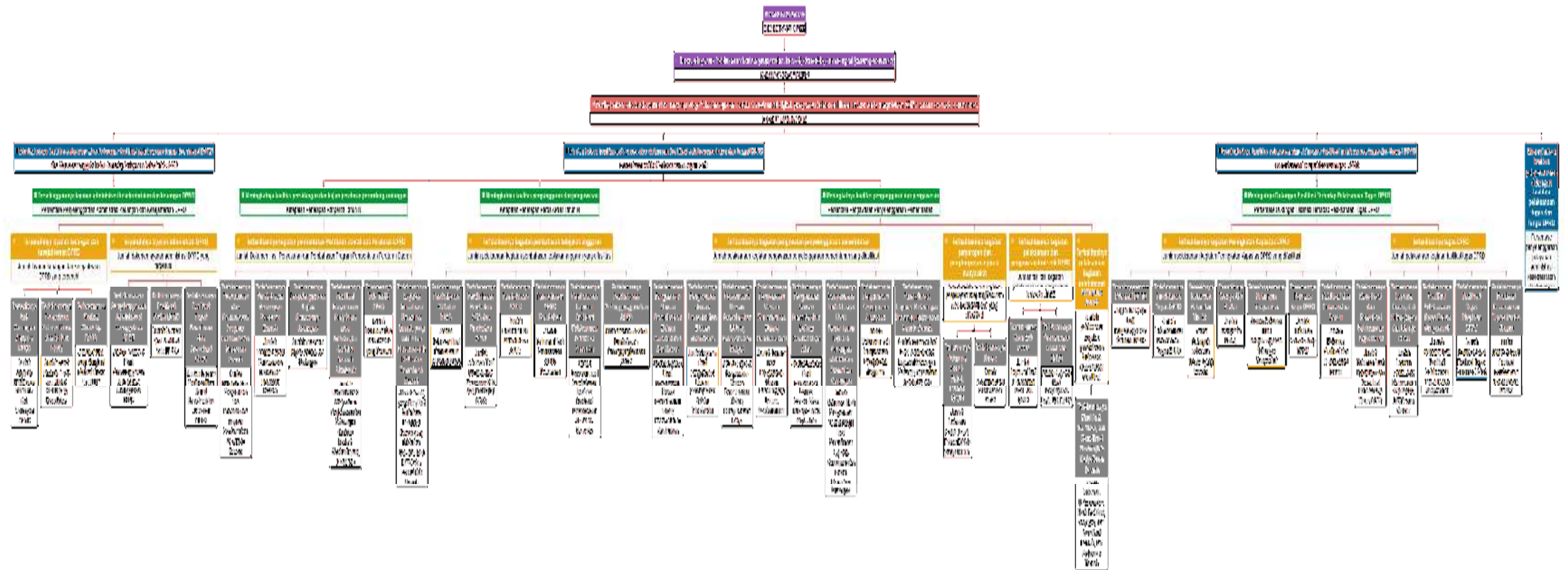
Dengan demikian, target pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan menjadi instrumen pengendali dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik secara lebih detail. Pencapaian IKK ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta memberikan dukungan optimal terhadap kelancaran tugas dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan di dalam Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025 – 2029 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD, maka perlu adanya penyelarasan kinerja dalam bentuk *cascading* dan pohon kinerja agar seluruh indikator yang ada dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dicapai secara maksimal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD dari level kepala perangkat daerah hingga pelaksana sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025- 2029

POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025-2029



BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta sebagai dasar pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029.

5.1. Mekanisme Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dilakukan melalui penyusunan Renja setiap tahun yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis. Untuk menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran, maka dilakukan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagai berikut:

1. Pengendalian

- Pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Subbagian, Bagian, hingga Sekretaris DPRD selaku Penanggung Jawab.
- Pengendalian diwujudkan dalam bentuk monitoring atas pelaksanaan program dan kegiatan melalui rapat koordinasi, telaahan staf, laporan berkala, serta supervisi langsung oleh pimpinan.
- Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan, dilakukan langkah-langkah korektif agar target kinerja dapat tercapai sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

2. Evaluasi

- Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

- Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan rekomendasi perbaikan.
- Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perencanaan tahun berikutnya serta bahan penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

5.2. Mekanisme Perubahan Renstra

Dalam pelaksanaan Renstra dimungkinkan terjadi perubahan terhadap kondisi internal maupun eksternal, seperti:

- Perubahan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional,
- Perubahan regulasi,
- Penyesuaian terhadap kebutuhan nyata pelayanan, atau
- Dinamika dalam pencapaian sasaran strategis.

Mekanisme perubahan Renstra dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Renstra hanya dapat dilakukan apabila terdapat penyesuaian signifikan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah atau perubahan RPJMD Kabupaten Gresik.
2. Perubahan dilakukan melalui proses reviu terhadap dokumen Renstra, kemudian disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
3. Dokumen Renstra yang telah direvisi selanjutnya ditetapkan kembali melalui Peraturan Kepala Daerah.

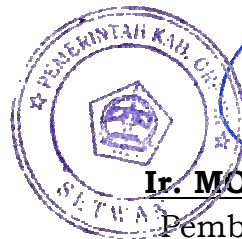
5.3. Penutup

Dengan tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh aparatur dapat memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada DPRD Kabupaten Gresik.

Renstra ini bukan merupakan dokumen yang kaku, tetapi bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, komitmen, konsistensi, serta kerja sama seluruh jajaran Sekretariat DPRD menjadi faktor penting dalam

mewujudkan sasaran pembangunan daerah melalui dokumen Renstra ini. Dengan demikian, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pedoman yang terukur, adaptif, dan akuntabel bagi seluruh aparatur dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Gresik, 19 September 2025
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GRESIK



Ir. MOKH NAJIH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011